

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).

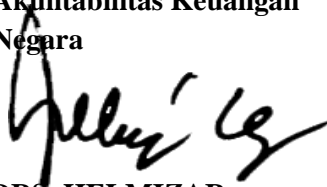
Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi XI terdapat 9 entitas, 1 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan 8 (BAPPENAS, BPKP, BPS, BUN, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS) entitas sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total anggaran belanja mitra Komisi XI sebesar Rp1.230.766.488.590.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp1.325.239.160.531.350,00. Total Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi XI tahun 2016 sebesar Rp 153.118.857.370.177,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi XI terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp4.112.490.000.000,00 potensi kerugian sebesar Rp191.620.000.000,00 dan kurang penerimaan sebesar Rp1.188.070.000.000,00.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi XI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi XI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

**Kepala Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan
Negara**



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1	Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	i
2	Daftar Isi.....	iv
3	Telaahan Kementerian.....	1
3.1.	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	
3.1.1.	Gambaran Umum.....	1
3.1.2.	Daftar Temuan.....	3
3.1.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	5
3.1.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	9
3.2.	LK Konsolidasi <i>State Accountability Revitalization Project ADB Loan Nomor 2927-Ino Tahun 2016</i> pada BPKP	
3.2.1.	Gambaran Umum.....	11
3.2.2.	Daftar Temuan.....	13
3.2.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	15
3.2.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	21
3.3.	LK Badan Pusat Statistik	
3.3.1.	Gambaran Umum.....	25
3.3.2.	Daftar Temuan.....	27
3.3.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	29
3.3.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	39
3.4.	LK <i>International Bank For Reconstruction And Development (IBRD) No. 8038-ID Statistical Capacity Building-Change And Reform For The Development Of Statistics (STATCAP - CERDAS)</i> Pada BPS	
3.4.1.	Gambaran Umum.....	41
3.4.2.	Daftar Temuan.....	43
3.4.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	45
3.4.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	49

3.5.	LK Bendahara Umum Negara	
3.5.1	Gambaran Umum.....	53
3.5.2	Daftar Temuan.....	55
3.5.3	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	57
3.5.4	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	61
3.6.	LK Kementerian Keuangan	
3.6.1.	Gambaran Umum.....	69
3.6.2.	Daftar Temuan.....	71
3.6.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	73
3.6.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	81
3.7.	LK <i>Indonesia Infrastructure Finance Development</i> pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Kementerian Keuangan	
3.7.1.	Gambaran Umum.....	87
3.7.2.	Daftar Temuan.....	89
3.7.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	91
3.7.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	93
3.8.	Kinerja Efektivitas Kegiatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Tahun Anggaran 2011 s.d. Semester I 2013 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	
3.8.1.	Gambaran Umum.....	95
3.8.2.	Daftar Temuan.....	97
3.8.3.	Telaahan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja.....	99
3.9.	PDTT Pengadaan Kapal Patroli Cepat Direktorat Penindakan Dan Penyidikan (DIT P.2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2016	
3.9.1.	Gambaran Umum.....	107
3.9.2.	Daftar Temuan.....	109
3.9.3.	Telaahan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.....	111

3.10.	PDTT Penagihan Pajak Tahun 2012 Dan Semester I Tahun 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kementerian Keuangan	
3.10.1.	Gambaran Umum.....	119
3.10.2.	Daftar Temuan.....	121
3.10.3.	Telaahan Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.....	123
3.11.	LK Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional	
3.11.1.	Gambaran Umum.....	137
3.11.2.	Daftar Temuan.....	139
3.11.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	141
3.11.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	149
3.12.	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
3.12.1	Gambaran Umum.....	155
3.12.2	Daftar Temuan.....	157
3.12.3	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	159
3.12.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	161
3.13.	PDTT Pencetakan, Pengeluaran, Dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2016 Pada Bank Indonesia, Perum Peruri, Dan Instansi Terkait Lainnya	
3.13.1	Gambaran Umum.....	167
3.13.2	Daftar Temuan.....	169
3.13.3	Telaahan Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.....	171
3.14.	PDTT Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2016 Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)	
3.14.1.	Gambaran Umum.....	173
3.14.2.	Daftar Temuan.....	175
3.14.3.	Telaahan Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.....	177
3.15.	Kinerja Subsidi KPR pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tahun 2016	
3.15.1	Gambaran Umum.....	187
3.15.2	Daftar Temuan.....	189

3.15.3	Telaahan atas Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja.....	191
3.16	PD TT Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, Dan Biaya Operasional Tahun Buku 2015 Dan 2016 Pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	
3.16.1.	Gambaran Umum.....	197
3.16.2.	Daftar Temuan.....	199
3.16.3.	Telaahan Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.....	201
3.17	LK Bank Indonesia	
3.17.1.	Gambaran Umum.....	205
3.17.2.	Daftar Temuan.....	207
3.17.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	209
3.17.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	215
3.18	LK Lembaga Penjamin Simpanan	
3.18.1.	Gambaran Umum.....	217
3.18.2.	Daftar Temuan.....	219
3.18.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	221
3.18.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	225
3.19	LK Otoritas Jasa Keuangan	
3.19.1.	Gambaran Umum.....	227
3.19.2.	Daftar Temuan.....	229
3.19.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	231
3.19.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	241

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BPKP dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BPKP dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:

**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

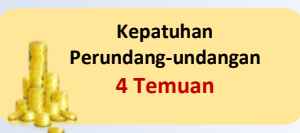
Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp34.658.015.507,00
- **Anggaran Belanja**
Rp1.625.999.190.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp1.451.897.346.317,00 (89,29%)

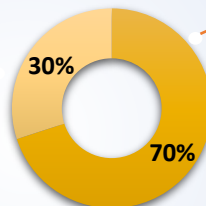


NERACA

- **Aset**
Rp1.879.407.771.273,00
- **Kewajiban**
Rp2.904.407.630,00
- **Ekuitas**
Rp1.876.503.363.643,00



**Kepatuhan
Perundang-undangan
4 Temuan**



Sistem Pengendalian Intern

7 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

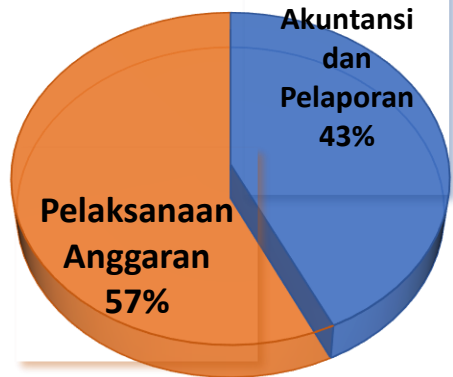
3

Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

4

Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

• Potensi Kerugian Negara

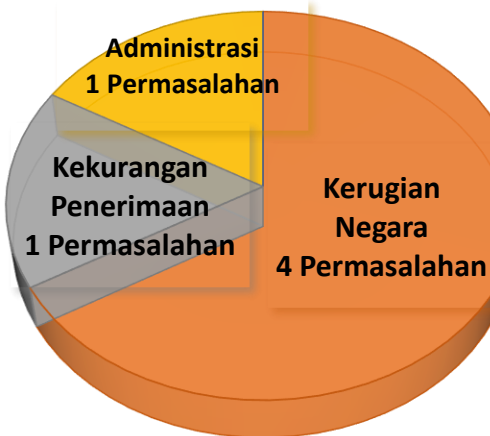
674,38
Juta

• Kekurangan Penerimaan

4,48
Juta

• Administrasi

1
Permasalahan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BPKP Tahun 2016 :

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Klausul Perjanjian Sewa antara BPKP dengan Pihak Ketiga Tidak Menguntungkan.
2	Sistem Pengendalian Intern atas PNBP pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan (Pusdiklatwas) Belum Tertib.
3	Realisasi Belanja Barang pada BPKP Tidak Sesuai Klasifikasi Belanja.
4	Penatausahaan Persediaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Belum Tertib.
5	Satu Unit Sepeda Motor Senilai Rp14,20 juta pada Satker Pusdiklatwas BPKP Hilang Sejak Tahun 2014 Belum Dilakukan Proses Tuntutan Ganti Rugi.
6	Penatausahaan Barang Milik Negara BPKP Belum Tertib.
7	Pengungkapan Dana Mitra pada Catatan atas Laporan Keuangan LK BPKP Satker Kantor Pusat TA 2016 Tidak Berdasarkan Realisasi.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Sewa Rumah Negara Belum Sepenuhnya Sesuai Keputusan Sekretaris Utama atau Kepala Perwakilan tentang Penunjukan Penghunian Penghuni Rumah Negara.
2	Penatausahaan Bukti Pendukung Pemotongan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada BPKP Belum Tertib.
3	Harga Tiket Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai dengan Data Manifes Penerbangan.
4	Kekurangan Volume Pekerjaan dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp328,28 juta.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 3 dan 6, dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan nomor 3.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI *STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR) PROJECT* ADB LOAN NOMOR 2927-INO PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Konsolidasi *State Accountability Revitalization Project* ADB-Loan Pada BPKP Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Konsolidasi *State Accountability Revitalization Project* ADB-Loan Pada BPKP dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Konsolidasi *State Accountability Revitalization Project* ADB-Loan Pada BPKP dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK memberikan opini TA 2016:

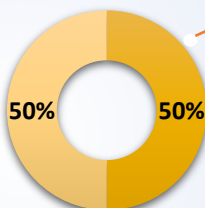
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran



- **Anggaran Belanja**
Rp259.347.072.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp190.842.359.961,00 (73,59%)

Kepatuhan
Perundang-undangan
4 Temuan



Sistem Pengendalian Intern

4 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- Kelemahan Struktur

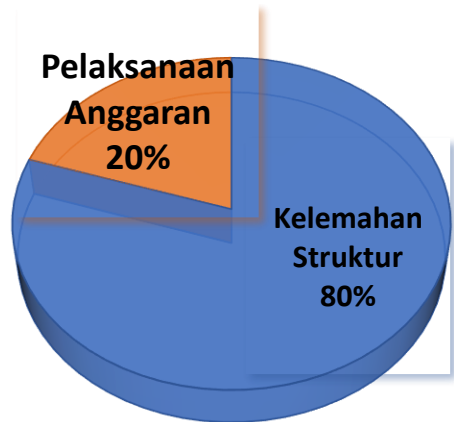
4

Permasalahan

- Pelaksanaan Anggaran

1

Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Kerugian Negara
3 Permasalahan

- Kerugian Negara

867,61
Juta

- Administrasi

0
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Konsolidasi *State Accountability Revitalization Project ADB Loan* Nomor 2927-Ino Tahun 2016 pada BPKP Tahun 2016 :

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Pengawasan dan Pengendalian atas Pembayaran Biaya Non Pendidikan pada Universitas Jambi Tidak Optimal
2	Pengendalian dan Pemantauan Terhadap Pengelolaan Dana Beasiswa STAR Kurang Memadai
3	BPKP Selaku <i>Executing Agency</i> Belum Tertib Memantau Pengembalian Belanja dari STAR ADB <i>Loan</i> ke Rekening Khusus
4	Data Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai dengan Data Manifes Penerbangan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Penerima Beasiswa yang Mengundurkan Diri dan <i>Drop Out</i> Belum Mengembalikan Dana Beasiswa Beserta Dendanya
2	Kelebihan Pembayaran atas Tunjangan Biaya Hidup Dan Tunjangan Biaya Domisili Program S1 dan S2 Beasiswa STAR ADB <i>Loan</i> sebesar Rp495.000.000,00
3	Kelebihan Pembayaran atas Biaya Yudisium/Wisuda Bagi Penerima Program S1 dan S2 Beasiswa STAR ADB <i>Loan</i> yang Terlambat Menyelesaikan Pendidikan
4	Harga Tiket Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai dengan Data Manifes Penerbangan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 1 dan 2 serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 1 dan 2.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pusat Statistik Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BPS dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BPS dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:

**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**



Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp49.230.815.123,00
- **Anggaran Belanja**
Rp5.060.851.131.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp4.610.855.600.103,00(91,11%)

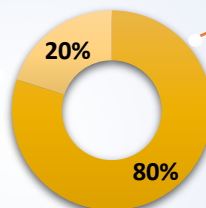


NERACA

- **Aset**
Rp3.069.947.226.404,00
- **Kewajiban**
Rp72.685.632.830,00
- **Ekuitas**
Rp2.997.261.593.574,00



**Kepatuhan
Perundang-undangan
1 Temuan**



Sistem Pengendalian Intern

4 Temuan



PERMASALAHAN

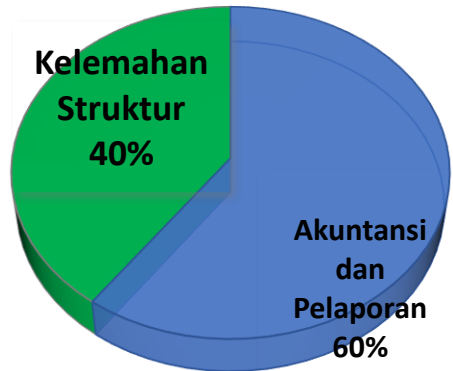
Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

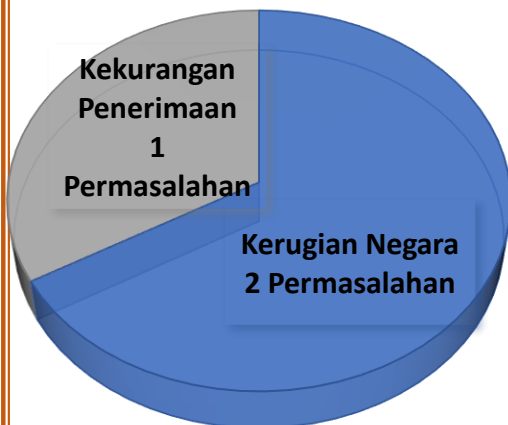
3
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

18,59
Juta

• Kekurangan Penerimaan

4,71
Juta

• Administrasi

0
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016:

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Proses Penyelesaian Piutang Tagihan TP/TGR Berlarut-Larut
2	Penatausahaan Aset Tetap pada BPS Belum Tertib
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senilai Rp2.295.290.090,00 Belum Jelas Penyelesaiannya
4	Aset Tak Berwujud (ATB) yang Sudah Tidak Ada Nilai Buku dan Sudah Tidak Bisa Dimanfaatkan Belum Dihapuskan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan Tidak Sesuai Ketentuan/Kontrak

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 1,2,3,dan 4 serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 1.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN

*INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) NO. 8038-ID STATISTICAL
CAPACITY BUILDING-CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT OF STATISTICS (STATCAP - CERDAS)
PADA BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2016*



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) BPS STATCAP-CERDAS Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BPS STATCAP-CERDAS dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BPS STATCAP-CERDAS dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

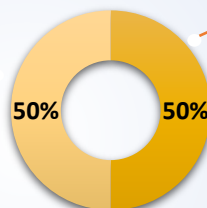
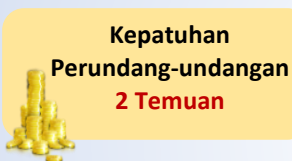
BPK memberikan opini TA 2016:

**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran



- **Anggaran Belanja**
Rp119.528.000.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp56.829.339.797,00 (47,54%)



Sistem Pengendalian Intern

2 Temuan



PERMASALAHAN

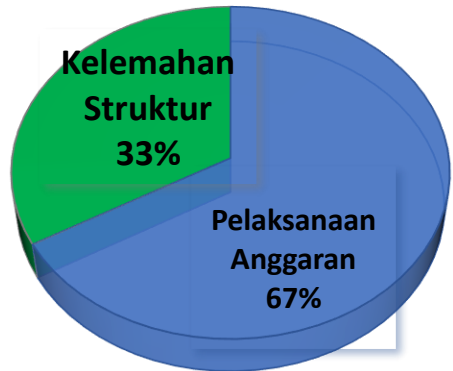
Sistem Pengendalian Intern

- Pelaksanaan Anggaran

2
Permasalahan

- Kelemahan Struktur

1
Permasalahan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK *International Bank For Reconstruction And Development (Ibrd) No. 8038-ID Statistical Capacity Building-Change And Reform For The Development Of Statistics (STATCAP - CERDAS)* Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016:

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Konsultan Paket 3 (<i>Consultants' Services: Technical Assistance for Human Resources Management and Organizational Alignment</i>) Belum Memadai
2	Belum Terdapat Prosedur Review/Monitoring oleh Tim STATCAP - CERDAS yang Menjamin Kinerja Konsultan Dilaksanakan Sesuai Tahapan Implementasi Perjanjian, dan Dokumentasi Pelaksanaan <i>Review/Monitoring</i> serta Verifikasi atas Dokumen <i>Timesheet</i>
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pelaksanaan Jasa Pelatihan Tata Kelola Data dan Manajemen Data Badan Pusat Statistik RI Tidak Melalui Proses Pengadaan Barang/ Jasa
2	Jasa Konsultan dari Tenaga Kerja Asing pada Paket <i>Owners Agent</i> , Paket 1, dan Paket 3 Tidak Memiliki Ijin Kerja (IMTA)

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 1 dan 2 serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 1 dan 2.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BUN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WDP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp138.543.000.000.000,00
- **Anggaran Belanja**
Rp1.180.070.000.000.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp1.279.807.157.379.660,00(92,21%)

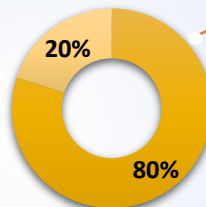


NERACA

- **Aset**
Rp3.199.134.293.989.340,00
- **Kewajiban**
Rp3.832.422.700.228.240,00
- **Ekuitas**
Rp(633.288.406.238.898,00)



**Kepatuhan
Perundang-undangan
3 Temuan**

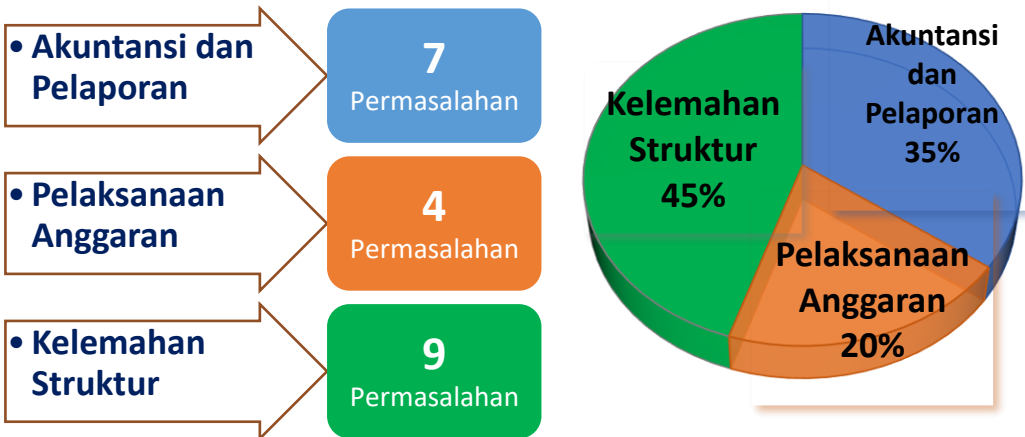


**Sistem Pengendalian Intern
12 Temuan**

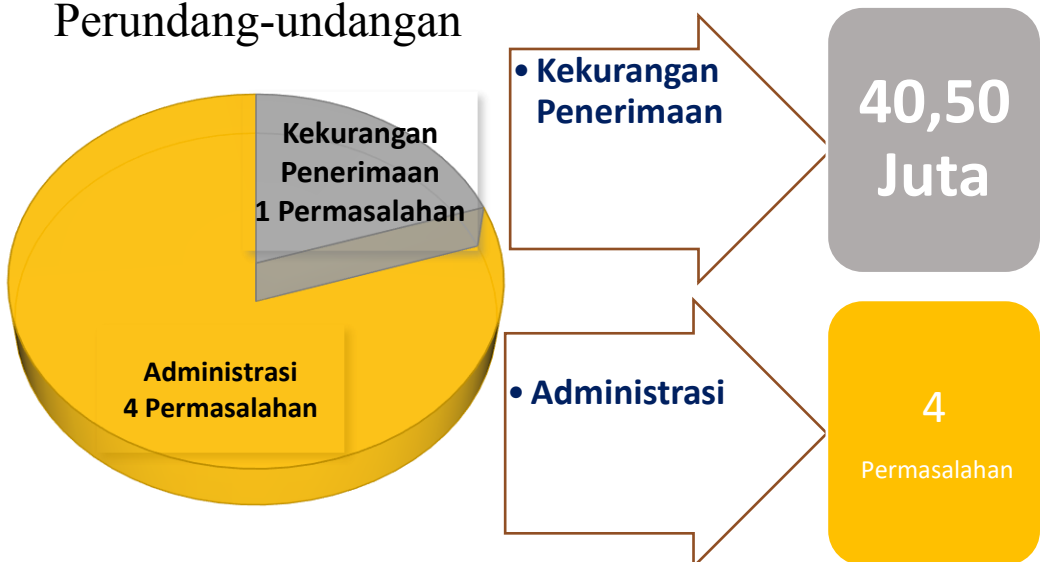


PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2016 :

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Kebijakan akuntansi BUN dan proses penyusunan beberapa transaksi belum diatur lengkap dan memadai.
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih Belum Memadai.
3	Pertanggungjawaban Penggunaan APBN Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Belum Jelas.
4	Penyusunan/Penetapan HPB Realisasi dan Format Laporan Pertanggungjawaban atas Belanja Subsidi Rastra dan Belanja Lain-Lain untuk Cadangan Beras Pemerintah, Belum Diatur dengan Jelas.
5	Pengendalian Atas Pengelolaan Program Subsidi Kurang Memadai.
6	Ketentuan Terkait Rincian <i>Allowable Cost</i> dan <i>Non Allowable Cost</i> Dalam Perhitungan Subsidi Listrik, PSO Pelni, PSO KAI, Pupuk, Benih, Rastra Seharusnya Diperbaiki dan/atau Ditetapkan Untuk Menjamin Konsistensi Pembebanan Biaya Pokok Subsidi Dimasa yang Akan Datang.
7	Dana Bagi Hasil atas PNPB SDA yang Belum Dapat Diidentifikasi Daerah Penghasilnya Belum Jelas Penyelesaiannya.
8	Proses Verifikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Belum Dapat Menjamin Ketepatan Sasaran Penyaluran Subsidi Bunga KUR.
9	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai.
10	Kebijakan Pelaksanaan Tindakan Khusus Untuk Menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) yang Bernilai Negatif Belum Jelas.
11	Klasifikasi Aset Eks HTBI yang Dikelola oleh LMAN Sebagai Investasi Pemerintah Tidak Memiliki Dasar Hukum yang Memadai
12	Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS dan Aset PKP2B Belum Didukung Oleh Sistem Terintegrasi, Rekonsiliasi Belum Mencakup Seluruh Aset KKKS, dan Verifikasi atas <i>Subsequent Expenditures</i> Belum Selesai.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pelaksanaan Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Tidak Didukung Data yang Memadai dan Diantaranya sebesar Rp15,58 Miliar Tidak Didasari oleh Kontrak.
2	Pemerintah Belum Menetapkan Status Setoran SuRplus BLU LPDP Sebesar Rp500,00 Miliar yang Telah Diatur Penggunaannya Sesuai Peraturan Perundangan
3	Aset Lainnya Berupa Aset Properti Eks. BPPN dan Eks. Kelolaan PT PPA serta BMN yang Berasal dari Barang Rampasan Senilai Rp464,39 Miliar dikuasai Pihak Ketiga, Tidak Ditemukan, Tidak Jelas Statusnya dan Belum Dilakukan Penilaian

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 5 dan 7, serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 1, 2 dan 3.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Keuangan Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kementerian Keuangan dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementerian Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

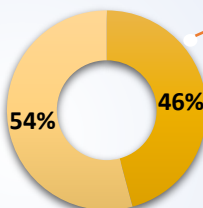
Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp14.491.114.408.437,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 43.829.847.448.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp39.234.758.903.298,00(89,52%)

NERACA

- **Aset**
Rp76.220.716.453.002,00
- **Kewajiban**
Rp22.316.990.529.397,00
- **Ekuitas**
Rp53.903.725.923.605,00

Kepatuhan
Perundang-undangan
13 Temuan

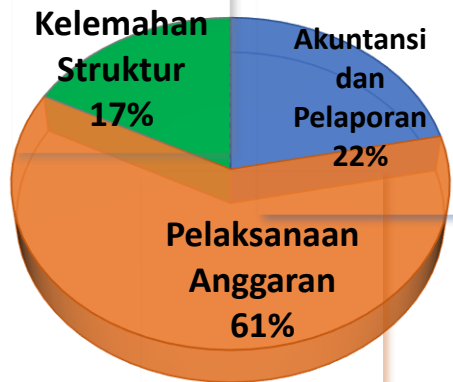


Sistem Pengendalian Intern
11 Temuan

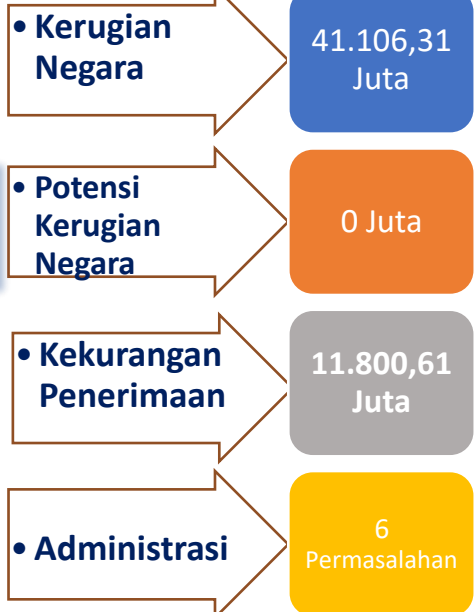
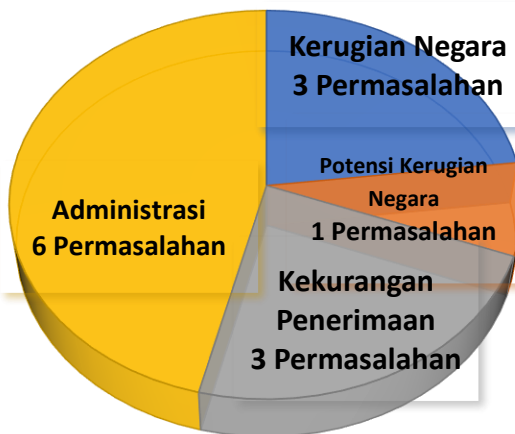


PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian Keuangan Tahun 2016 :

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Proses Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan Belum Memadai
2	Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) Tidak Konsisten
3	Pengendalian atas Pengelolaan Penerimaan Bea Keluar serta Pelayanan Ekspor Melalui Sistem Komputer Pelayanan Ekspor pada DJBC Belum Sepenuhnya Memadai
4	Pengendalian Penerimaan Cukai Belum Memadai
5	Pengendalian Penagihan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Belum Memadai
6	Penatausahaan Jaminan Tunai dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Neraca DJBC Belum Tertib
7	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan
8	Penyelesaian Piutang PNBK pada KPUBC Tanjung Priok Sebesar Rp13.091.180.000,00 Berlarut-larut
9	Tindakan Penagihan atas Piutang Pajak Tidak Memadai Hingga Menjadi Daluwarsa
10	Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor yang Dilimpahkan dari DJBC ke DJP Belum Memadai
11	Pengelolaan Persediaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belum Memadai
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pajak Masukan yang Dilaporkan oleh PKP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara Melebihi Jangka Waktu Pelaporan yang Diperbolehkan Sebesar Rp8,23 Miliar
2	PPN yang Dipungut oleh Wajib Pungut Tidak Ditemukan Setorannya pada MPN Sebesar Rp274,97 Miliar
3	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP Tidak Memperhitungkan Piutang kepada Wajib Pajak Sebesar Rp879,02 Miliar
4	Pengkreditan Pajak Masukan PT D.I Sebesar Rp3,32 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan
5	Kekurangan Penerimaan Negara dari Bea Keluar atas Ekspor Konsentrat Tembaga Tahun 2016 pada KPPBC Sumbawa Sebesar Rp982,55 Juta
6	Persetujuan Permohonan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sebesar Rp3,05 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan
7	Denda Keterlambatan Pekerjaan pada BPDPKS, DJP, dan DJBC Belum/Kurang Dikenakan/Ditetapkan/Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp10,75 Miliar
8	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp26 Miliar

9	Perhitungan Harga Satuan pada Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan Tahun 2016 dengan Metode “ <i>Send and Receive</i> ” Tidak Sesuai Ketentuan
10	Pekerjaan pada Kemenkeu Tahun 2016 Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp15,10 Miliar
11	Terdapat Pekerjaan Mendahului Kontrak atas Pekerjaan Pemeliharaan <i>Trace Detector</i>
12	Perencanaan Empat Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan
13	Penatausahaan Aset Tanah dan Aset Gedung dan Bangunan Belum Sesuai Dengan Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 2, 5, dan 11 serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 2, 3, dan 4.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE DEVELOPMENT (IIFD) PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) IIFD Kementerian Keuangan Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK IIFD Kementerian Keuangan dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK IIFD Kementerian Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK memberikan opini TA 2016:

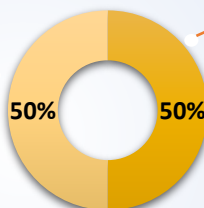
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran



- **Anggaran Belanja**
USD371.798,42
- **Realisasi Belanja**
USD288.629,29 (78%)

**Kepatuhan
Perundang-undangan
1 Temuan**



Sistem Pengendalian Intern

1 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- **Kelemahan Struktur**

2

Permasalahan

- **Pelaksanaan Anggaran**

1

Permasalahan

Pelaksanaan Anggaran
33%

Kelemahan Struktur
67%

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Kerugian Negara
1 Permasalahan

- **Kerugian Negara**

12,91
Juta

- **Administrasi**

0
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK *Indonesia Infrastructure Finance Development* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2016:

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Pengendalian atas Pengelolaan Hibah <i>Indonesia Infrastructure Finance Development</i> (IIFD) Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Secara Memadai dan <i>Project Operations Manual</i> (POM) terlambat ditetapkan.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Perjalanan Dinas ke Toronto, Kanada Tidak Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Sehingga Terjadi Kelebihan Pembayaran Senilai Rp12.912.443,40

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 1 serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 1.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI KINERJA ATAS EFEKTIFITAS KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM Mendukung Pencapaian Target Penerimaan Pajak TAHUN ANGGARAN 2011 S.D. SEMESTER I 2013 PADA

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I, KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I, KPP PMA DUA, KPP PMA LIMA, KPP MADYA MEDAN, KPP PRATAMA MEDAN POLONIA, KPP MADYA SURABAYA, DAN KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI JAKARTA, MEDAN, DAN SURABAYA



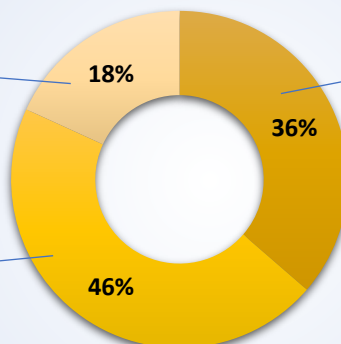
Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Kegiatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun Anggaran 2011 s.d. semester I 2013 bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak dalam mendukung tercapainya target penerimaan pajak.

BPK memberikan kesimpulan:
bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif

TEMUAN

Kegiatan Pendukung
Pengawasan dan
Pemeriksaan
2 Temuan

Pemeriksaan
Pajak
5 Temuan



Pengawasan
Pajak
4 Temuan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan Kinerja Efektivitas Kegiatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Dalam Mendukung Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2011 s.d. Semester I 2013 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan:

NO	TEMUAN
1	Pengawasan Kepatuhan Penghitungan Pajak Belum Dilaksanakan Secara Memadai
2	Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Pajak Belum Dilaksanakan Secara Memadai
3	Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Pajak Belum Dilaksanakan Secara Memadai
4	Kegiatan Pengawasan Pajak Belum Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Dan Prosedur Yang Berlaku
5	Pengusulan Dan Persetujuan Pemeriksaan Pajak Belum Dilaksanakan Sesuai Dengan Prosedur
6	Audit Program Belum Dibuat Sesuai Dengan Tujuan Pemeriksaan Pajak
7	Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Belum Sesuai Dengan Ketentuan Dan Standar Pemeriksaan
8	Kegiatan Pemeriksaan Pajak Belum Didokumentasikan Dan Diarsipkan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku
9	Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Belum Disupervisi Secara Memadai
10	Pengelolaan Sumber Daya Account Representative Dan Pemeriksa Pajak Belum Memadai
11	Sistem Informasi Belum Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan kesimpulan pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada nomor 5,6, 8, dan 9.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGADAAN KAPAL PATROLI CEPAT DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN (DIT P.2) DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI (DJBC) TAHUN ANGGARAN 2013 S.D. SEMESTER I 2016 PADA KANTOR PUSAT DJBC, PANGKALAN SARANA OPERASI (PSO) TANJUNG BALAI KARIMUN, PSO BATAM, PSO PANTOLOAN, DAN INSTANSI SERTA PIHAK TERKAIT LAINNYA DI JAKARTA, TANJUNG BALAI KARIMUN, BATAM, PANTOLOAN, DAN LAMPUNG



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Kapal Patroli Cepat Direktorat Penindakan Dan Penyidikan (Dit P.2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2013 s.d. semester I 2016 bertujuan untuk menguji:

- Penyusunan rencana kebutuhan kapal patroli cepat didasarkan pada kebutuhan riil entitas;
- Penyusunan anggaran telah mempertimbangkan rencana kebutuhan kapal patroli;
- Proses pengadaan kapal patroli cepat telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan ketentuan lain terkait pengadaan barang/jasa;
- Penyedia kapal patroli cepat telah menyerahkan kapal patroli dengan kontrak/perjanjian;
- Pemanfaatan kapal patroli cepat oleh Pemerintah sesuai dengan tujuan pengadaannya

BPK memberikan kesimpulan:
BPK masih menemukan adanya ketidakpatuhan dalam Pengadaan Kapal Patroli Cepat Dit. P2 DJBC.

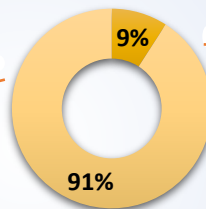
Anggaran dan Realisasi Pengadaan Kapal Patroli Cepat



- **Anggaran Tahun 2013**
Rp59.036.474.000,00
- **Realisasi Tahun 2013**
Rp59.036.474.000,00 (100%)
- **Anggaran Tahun 2014**
Rp468.000.000.000,00
- **Realisasi Tahun 2014**
Rp467.736.624.203,00(99,94%)
- **Anggaran Tahun 2015**
Rp580.025.914.000,00
- **Realisasi Tahun 2015**
Rp580.025.912.697,00(99,99%)

**Kepatuhan Perundang-undangan
10 Permasalahan**

- **Kerugian**
Rp 1.022,23 Juta
- **Kekurangan Penerimaan**
Rp5.353,49Juta
- **Penyimpangan Administrasi**
6 Permasalahan



Sistem Pengendalian Intern

1 Permasalahan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengadaan Kapal Patroli Cepat Direktorat Penindakan Dan Penyidikan (DIT P.2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2016 pada Kantor Pusat DJBC:

NO	TEMUAN
1	Proses Penganggaran dan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Kapal Patroli Cepat DJBC Tidak Sesuai Ketentuan.
2	Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tidak Didukung Dengan Data Harga Yang Dapat Dipertanggungjawabkan.
3	Evaluasi dan Penilaian Penawaran Pengadaan Kapal Tidak Dilakukan dengan Benar.
4	Kelebihan Pembebanan Biaya Umum (model test) senilai Rp1.022.230.000,00.
5	Material yang Terpasang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis yang Ditentukan Dalam Kontrak.
6	Rekomendasi Badan Klasifikasi Atas Enam Kapal Belum Sepenuhnya Ditindaklanjuti Namun Telah Diserahterimakan.
7	Sebagian Pekerjaan Utama Sembilan Kapal Disubkontrak Tanpa Persetujuan Tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen.
8	Gambar Desain Konsultan Perencana Tidak Digunakan sebagai Acuan Desain Penyedia.
9	Draft Light Ship Weight Kapal FPB 28 M dan FPB 38 M Tidak Sesuai Dengan Kontrak.
10	Kekurangan Kecepatan Tujuh Kapal Sebagaimana Dipersyaratkan Dalam Kontrak Belum Dikenakan Denda dan/atau Belum Dilakukan Perbaikan pada Saat Serah Terima Kapal.
11	Pemutusan Kontrak Pengadaan Sembilan Kapal, Namun Tetap Diberikan Kesempatan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan kesimpulan pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada nomor 2, 4, 10, dan 11.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2012 DAN SEMESTER I TAHUN 2013 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) WAJIB PAJAK BESAR SATU, KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA, KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT, KPP MINYAK DAN GAS BUMI, DAN KPP MADYA JAKARTA PUSAT SERTA INSTANSI TERKAIT DI JAKARTA



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Kementerian Keuangan Tahun 2016 bertujuan untuk meyakini bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, kegiatan penagihan dan pengelolaan barang sitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK memberikan kesimpulan:
BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan SPI atas kegiatan penagihan pajak.

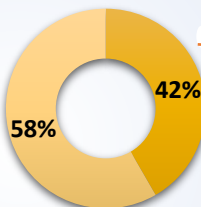
Target dan Realisasi Piutang Pajak



- **Piutang Pajak Tahun 2012**
Rp 7.504.377.903.351,00
- **Target Piutang Pajak Tahun 2012**
Rp3.872.323.464.987,00
- **Realisasi Piutang Pajak Tahun 2012**
Rp3.007.546.548.118,44 (77,67%)
- **Piutang Pajak Tahun 2013**
Rp16.560.882.163.365
- **Target Piutang Pajak Tahun 2013**
Rp5327.734.464.522,00
- **Realisasi Piutang Pajak Tahun 2013**
Rp3.163.783.424.197,00

Kepatuhan Perundang-undangan 7 Permasalahan

- **Potensi Kerugian**
Rp324.438,03 Juta
- **Kekurangan Penerimaan**
Rp523.908,23Juta
- **Penyimpangan Administrasi**
3 Permasalahan



Sistem Pengendalian Intern 5 Permasalahan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Penagihan Pajak Tahun 2012 Dan Semester I Tahun 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP):

NO	TEMUAN
1	Lima KPP Belum Melakukan Tindakan Penagihan yang Memadai atas Tunggalan Senilai Rp620.700.061.068,00 dan USD179,267,306.07, Melakukan Tindakan Penagihan Tidak Sesuai Ketentuan, dan Tiga KPP Tidak Melakukan Penyitaan Terhadap Harta Wajib Pajak yang Surat Pakasanya Telah Melampaui Batas Waktu yang Ditentukan dalam Peraturan.
2	KPP Belum Mengenakan STP Bunga Penagihan Sebesar Rp134.419.926.125,00 dan USD31,620,791.00, Kurang Menetapkan STPBP Senilai Rp118.703.629,00 dan Lebih Menetapkan STPBP Senilai Rp69.784.690,00 serta STP Bunga Penagihan Sebesar Rp104.830.718.680,00 Tidak Diterbitkan Pada Saat Terjadinya Restitusi yang Diajukan oleh WP.
3	KPP Migas Tidak Menagih Tunggalan Pajak atas Technical Service dan Biaya Overhead dari Kantor Pusat KKKS Sebesar Rp284.465.881.058,00 Sesuai Ketentuan.
4	KPP Wajib Pajak Besar Satu Tidak Memperhitungkan Utang Pajak Sebesar Rp1.617.442.512,00 dan USD719,314.00 (Ekuivalen dengan Rp9.220.886.166,00) dalam Pemberian Restitusi.
5	Pelaksanaan Penagihan yang Dilaksanakan oleh KPP WP Besar Empat dan KPP Madya Jakarta Pusat Belum Selaras dengan Strategi Tindakan Penagihan yang Telah Ditetapkan Dalam SE – 29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
6	KPP Madya Jakarta Pusat tidak Melakukan Tindakan Penagihan Lebih Lanjut terhadap Wajib Pajak atas Penolakan Permohonan Angsuran dan Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Pembayaran Secara Angsuran Tanpa Permohonan Angsuran Sehingga atas Piutang Pajak Sebesar Rp73.006.251,00 Belum Bisa Dilunasi dengan Segera.
7	KPP Madya Jakarta Pusat Baru Menerbitkan SKPKB/STP Sebesar Rp324.438.039.982,00 Setelah Keputusan Pailit atas PT MB dan SKPKB/STP Sebesar Rp1.662.257.308,00 Diterbitkan Sebelum Keputusan Pailit Tanpa Melakukan Tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan kesimpulan pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada nomor 1 sampai dengan nomor 7.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN/BAPPENAS) TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BAPPENAS dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BAPPENAS dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:

**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

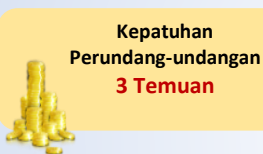
Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp4.044.474.873,00
- **Anggaran Belanja**
Rp2.187.213.031.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp1.891.019.498.100,00 (86,46%)

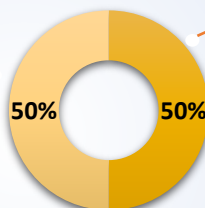


NERACA

- **Aset**
Rp940.503.980.481,00
- **Kewajiban**
Rp238.133.226.995,00
- **Ekuitas**
Rp702.503.980.481,00



**Kepatuhan
Perundang-undangan
3 Temuan**



Sistem Pengendalian Intern

3 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

3

Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

1

Permasalahan

Pelaksanaan Anggaran
25%

Akuntansi dan Pelaporan
75%

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

• Potensi Kerugian Negara

1.916,20
Juta

• Kekurangan Penerimaan

344,91
Juta

• Administrasi

2
Permasalahan

Potensi Kerugian Negara
1 Permasalahan

Kekurangan Penerimaan
1 Permasalahan

Administrasi
2 Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Tahun 2016:

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Penganggaran Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) dan Pengajuan Atas Pengesahan Pendapatan Hibah MCC Sampai Dengan Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai.
2	Pengelolaan Persediaan pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai.
3	Pengelolaan Aset Tetap pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 Belum Sepenuhnya Memadai.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Hibah Langsung Kas dan Non Kas Luar Negeri senilai Rp 1,74 Triliun belum ada Berita Acara Serah Terima dan senilai Rp475,71 Miliar belum dipertanggungjawabkan secara tertib.
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lift Gedung Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 Senilai Rp3,83 Miliar Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.
3	Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian <i>Built Operate and Transfer</i> (BOT) Tanah Dan Bangunan antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT BSU Belum Memadai

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 2 dan 3 serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 2 dan 3.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LKPP dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LKPP dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



**2014
WTP**



**2015
WTP**

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Dengan Pengecualian
(WDP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp854.131.110,00
- **Anggaran Belanja**
Rp179.790.821.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp134.491.301.970,00(74,8%)

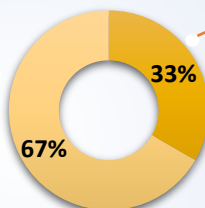


NERACA

- **Aset**
Rp407.352.146.847,00
- **Kewajiban**
Rp263.558.604,00
- **Ekuitas**
Rp407.088.588.243,00



**Kepatuhan
Perundang-undangan
2 Temuan**



**Sistem Pengendalian Intern
1 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

- Akuntansi dan Pelaporan

1
Permasalahan

Akuntansi dan Pelaporan
100%

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kekurangan Penerimaan

34,88
Juta



- Administrasi

1 Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2016 :

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin Minimal Senilai Rp9,25 Miliar Tidak Diyakini Kewajarannya.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Perawatan, Keindahan dan Keamanan Gedung LKPP Tidak Sesuai dengan Ketentuan
2	Belanja Modal Berupa Pengadaan Barang Pengembangan Data Center Lanjutan Tahun Anggaran 2016 dengan Nilai Kontrak Rp2,68 Miliar Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 1 serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 1 dan 2.

TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENCETAKAN, PENGELUARAN, DAN PEMUSNAHAN RUPIAH TAHUN 2016 PADA BANK INDONESIA, PERUM PERURI, DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA



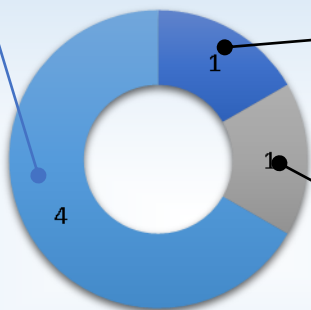
Pemeriksaan atas kegiatan pengadaan bahan dan pencetakan uang, pengeluaran uang; dan kegiatan pemusnahan uang tidak layak edar selama Tahun 2016 bertujuan untuk menilai apakah pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah pada Tahun 2016 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN BPK

Pencetakan dan Pengeluaran Rupiah Tahun 2016 **telah sesuai dengan kriteria**, sedangkan Pemusnahan Rupiah Tahun 2016 **belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria** yang berlaku

Temuan

4 Temuan Lain tidak diangkat oleh BPK



1. Kedatangan bahan uang kertas dan penyelesaian pencetakan terlambat sehingga Harga Cetak Sempurna (HCS) uang kertas TA 2016 yang diterima BI kurang dari jumlah yang direncanakan

2. Penarikan masyarakat atas Uang Logam (UL) di tahun 2016 lebih kecil dari proyeksi sehingga persediaan UL di BI menumpuk



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pencetakan, Pengeluaran, Dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2016 Pada Bank Indonesia, Perum Peruri, Dan Instansi Terkait Lainnya:

NO	TEMUAN
1	Kedatangan bahan uang kertas dan penyelesaian pencetakan terlambat sehingga Harga Cetak Sempurna (HCS) uang kertas TA 2016 yang diterima BI 2.493.357.039 lembar kurang dari jumlah yang direncanakan
2	Penarikan masyarakat atas Uang Logam (UL) di tahun 2016 lebih kecil dari proyeksi sehingga persediaan UL di BI menumpuk
3	Persediaan bahan uang per 31 Desember 2016 tidak dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan pencatatan persediaan bahan uang/Tata Usaha Bayangan (TUB) dan monitoring perkembangan persediaan bahan uang;
4.	Fisik pelat afkir eks cetak <i>offset</i> dan eks cetak <i>intaglio</i> belum ditatausahakan dengan tertib
5.	Pengendalian terhadap hasil cetak bahan uang di Perum Peruri belum dilaksanakan secara memadai
6.	Pelaksanaan penggantian <i>sparepart</i> pada kegiatan pemeliharaan rutin mesin perkasan belum sepenuhnya sesuai perjanjian.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan kesimpulan pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada nomor 1 dan 2.

TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN KREDIT SEGMENT KORPORASI TAHUN BUKU 2016 PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.



Pemeriksaan atas pengelolaan kredit pada Segmen Korporasi untuk debitur BUMN, debitur Bisnis Korporasi dan Multinasional maupun International dan Local Loan dan Pengelolaan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada Segmen Korporasi (debitur BUMN serta debitur Korporasi & Multinasional) pada tahun buku 2016 bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan kredit segmen korporasi Tahun Buku 2016 pada Bank BNI telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.

KESIMPULAN BPK

Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2016 pada Bank BNI **cukup sesuai** dengan Peraturan, Surat Edaran dan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Pedoman Perkreditan dan Peraturan Pelaksanaan serta peraturan intern Bank BNI lainnya yang relevan

Temuan

13. Pemberian fasilitas kredit PT NP berisiko tinggi

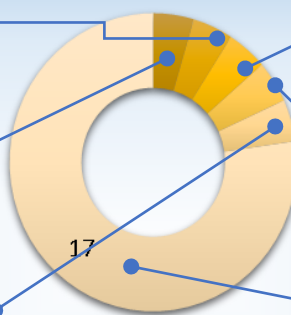
22. Pemberian fasilitas kredit PT MG kurang melindungi kepentingan

20. Penetapan limit pembelian Mid Term Notes PT IBF tidak mempedomani ketentuan dan berpotensi merugikan

18. Pemberian fasilitas KMK promes kepada PT TRIO berisiko tinggi dan berpotensi merugikan

19. Pemberian fasilitas KMK dan KI kepada PT DAN sebesar Rp1.138.495.288.372,00 berpotensi menjadi kredit

17 Temuan tidak diangkat oleh BPK



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2016 Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

NO	TEMUAN
1	Pemberian Fasilitas Kredit PT JSM dengan Baki Debit per 31 Desember 2016 Sebesar Rp797.309.344.782,00 Berisiko Tinggi
2	Pemberian Kredit Modal Kerja kepada PTPN III yang Bersifat <i>Corporate Loan</i> Belum Mengatur Secara Rinci Objek yang Dapat Dibiayai oleh Bank BNI
3	Skema Pemberian Kredit kepada PTPN IV Sebesar Rp800.000.000.000,00 Kurang Tepat
4	PTPN VIII Belum Memenuhi <i>Financial Covenant</i> yang Diperyaratkan
5	Agunan Tanah PT PKG Dalam Fasilitas Kredit Investasi Secara <i>Club Deal</i> Dijaminkan juga pada Bank Lain
6	Pemberian Fasilitas Kredit PT DI dengan Baki Debit per 31 Desember 2016 Sebesar USD121,014,811.40 Berisiko Tinggi
7	Fasilitas Kredit Kepada Perum BULOG dengan Baki Debit per 31 Desember 2016 Sebesar Rp4.487.128.178.751,00 Berisiko Tinggi
8	Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT MMP Belum Mempertimbangkan Ketentuan dalam Buku Pedoman Perkreditan
9	Pemberian Fasilitas Kredit PT PEIF berupa <i>Take Over</i> dengan Baki Debit per 31 Desember 2016 Sebesar USD25,616,471.00 Belum Sesuai Ketentuan dan Berisiko Tinggi
10	Pemberian Fasilitas Kredit PT TKA dengan Baki Debit per 31 Desember 2016 Sebesar Rp132.286.762.600,68 Berisiko Tinggi dan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-hatian
11	Pemberian Fasilitas Kredit CV KM dengan Baki Debit per 31 Desember 2016 Sebesar Rp47.382.713.681,00 Berisiko Tinggi
12	Pemberian Fasilitas Kredit PT MMB Sebesar USD 49,877,840.00 Berisiko Tinggi
13	Pemberian Fasilitas Kredit PT NP dengan Baki Debit per 31 Desember 2016 Sebesar Rp1.365.999.844.152,00 dan USD12,255,000.00 Berisiko Tinggi
14	Penetapan Agunan atas Pemberian Fasilitas Kredit PT IBP dengan Baki Debit per 31 Desember 2016 Sebesar USD44,000,000.00 Belum Sesuai Ketentuan
15	Pemberian Fasilitas Kredit Investasi PT KE Berisiko Tinggi
16	Pemberian Fasilitas Kredit Investasi <i>Refinancing</i> kepada PT PK Belum Sesuai Ketentuan

17	Pemantauan atas Pemenuhan Kesepakatan (<i>covenant</i>) pada Fasilitas Kredit PT SA dan PT GBS Belum Optimal
18	Pemberian Fasilitas KMK Promes Kepada PT TRIO Berisiko Tinggi dan Berpotensi Merugikan Bank BNI sebesar Rp1.331.736.299.655,00
19	Pemberian Fasilitas KMK dan KI kepada PT DAN sebesar Rp1.138.495.288.372,00 Berpotensi Menjadi Kredit Bermasalah
20	Penetapan Limit Pembelian <i>Mid Term Notes</i> PT IBF Tidak Mempedomani Ketentuan yang Berlaku di Bank BNI dan Berpotensi Merugikan Bank BNI Minimal sebesar Rp300.000.000.000,00
21	Persyaratan Pencairan Kredit dan Restrukturisasi pada BJ Grup Kurang Melindungi Kepentingan Bank BNI Termasuk Kepentingan <i>Second Way Out</i>
22	Pemberian Fasilitas Kredit PT MG dengan Baki Debit per 31 Desember 2016 Sebesar Rp347.819.652.000,00 Kurang Melindungi Kepentingan <i>First Way Out</i> Bank BNI

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan kesimpulan pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada nomor 13,18,19,20 dan 22.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SEJAHTERA DAN SUBSIDI SELISIH ANGSURAN (SSA)/ SUBSIDI SELISIH BUNGA (SSB) PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.



Pemeriksaan efektivitas kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian/pengawasan KPR Sejahtera dan SSA/SSB bertujuan mengetahui dan menilai efektivitas pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian /pengawasan) KPR Sejahtera dan SSA/SSB yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Bank BTN)

KESIMPULAN

Bank BTN dalam menjalankan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian /pengawasan KPR Sejahtera dan SSA/SSB **cukup efektif**.

Jumlah Temuan

10 Temuan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas Pemeriksaan Kinerja Subsidi KPR pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tahun 2016:

NO	TEMUAN
1	Penyaluran KPR sejahtera FLPP Tahun 2015 oleh Bank BTN melampaui DIPA dan PKO Sebesar Rp5.011.412.000.000,00
2	Pemenuhan kebutuhan pegawai dan kesetaraan antara Job Grade dengan Person Grade untuk pegawai pengelola KPR sejahtera FLPP dan SSA/SSB belum tercapai
3	Pelaksanaan penilaian Key Performance Indicator pegawai pada sistem manajemen kinerja (SMK) Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah belum seragam
4	Bank BTN belum memiliki SOP mitigasi risiko atas surat penegasan persetujuan pemberian kredit yang telah melewati jangka waktu satu bulan dan belum dilaksanakan akad kreditnya
5	Rumah KPR Sejahtera FLPP dan subsidi selisih angsuran/subsidi selisih bunga sebanyak 538 Unit hasil cek fisik oleh tim dan 4.570 Unit yang dilaporkan Bank BTN belum dimanfaatkan oleh Debitur
6	Penyelesaian kredit bermasalah KPR Sejahtera FLPP dan SSA/SSB Bank BTN belum dilakukan sesuai ketentuan
7	Bank BTN belum proaktif dalam pengajuan potensi klaim asuransi kredit macet sebesar Rp366.017.121.945,00 dan belum melaporkan monitoring hasil realisasi klaim asuransi debitur macet serta penghapusbukuan atas klaim asuransi kredit macet yang telah terbayar belum sepenuhnya dilaksanakan
8	Petugas Asset Management Division Kantor Cabang belum memanfaatkan sistem aplikasi e-Coll, e-Doc dan btnproperti.co.id dalam upaya mempercepat penyelesaian kredit
9	Pemberian fasilitas KYG Sebesar Rp3.000.000.000,00 dan KPL Sebesar Rp2.000.000.000,00 kepada PT RJ tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta penyaluran kpr tidak sesuai ketentuan dan pembangunan unit rumah kepada 34 Debitur Perumahan Gerbang Mahkota/Taas Korpri di Manado senilai Rp2.381.000.000,00 terbengkalai sejak Tahun 2012
10	Aplikasi iLoan pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah belum mengakomodir perhitungan angsuran dan tidak terintegrasi dengan iLoan konvensional dalam pelaksanaan pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan Subsidi Selisih Margin (SSM)/Subsidi Selisih Angsuran (SSA)

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan kesimpulan pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada nomor 5,7, dan 9.

TELAAHAN ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN BISNIS, INVESTASI, PENDAPATAN, DAN BIAYA OPERASIONAL TAHUN BUKU 2015 DAN 2016 PADA PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO), ANAK PERUSAHAAN DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

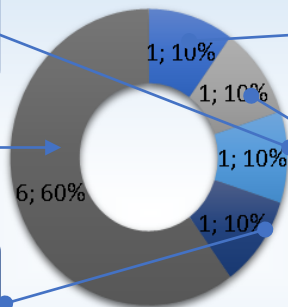


Pemeriksaan bisnis, pendapatan, investasi, dan biaya operasional pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Asei Indonesia, bertujuan untuk menilai Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional Tahun Buku 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya

KESIMPULAN BPK

Tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa pengelolaan bisnis, pendapatan, investasi, dan biaya operasional tahun 2015 dan 2016 **tidak sesuai** dengan Peraturan, Surat Edaran, dan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, dan Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), serta Peraturan Pelaksanaan terkait lainnya

Temuan



Penatausahaan piutang reasuransi pada PT Asuransi Asei Indonesia tidak tertib sehingga terjadi kekurangan pembebanan

Pemberian motivasi kepada karyawan PT Reasuransi Indonesia Utama belum diatur dalam perjanjian kerja bersama dan belum

6 Temuan tidak dibahas

Penatausahaan piutang premi pada PT Asuransi Asei Indonesia tidak tertib sehingga terjadi kekurangan pembebanan

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada PT Reasuransi Indonesia Utama tidak sesuai ketentuan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas Pemeriksaan Atas Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, Dan Biaya Operasional Tahun Buku 2015 Dan 2016 Pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero):

NO	TEMUAN
1	Pengendalian atas pengelolaan klaim dan monitoring piutang subrogasi pada PT Reasuransi Indonesia Utama belum memadai
2	PT Reasuransi Indonesia Utama tidak optimal dalam melakukan pengendalian atas piutang premi dan reviu dokumen perjanjian bisnis
3	PT Reasuransi Indonesia Utama belum merevisi SOP atas penyelesaian klaim dan lambat menyelesaikan <i>Accounts Run-Off</i> atas pengajuan klaim yang berasal dari bisnis Ex PT Reasuransi Umum Indonesia
4	Pemberian bantuan motivasi kepada karyawan PT Reasuransi Indonesia Utama minimal Sebesar Rp20.276.537.467,00 belum diatur dalam perjanjian kerja bersama dan belum mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
5	Pertanggungjawaban biaya transportasi udara dalam perjalanan dinas pada PT Reasuransi Indonesia Utama tidak sesuai ketentuan
6	Penatausahaan piutang premi pada PT Asuransi Asei Indonesia tidak tertib sehingga terjadi kekurangan pembebanan cadangan piutang premi Pada Laporan Keuangan 2016 minimal sebesar Rp22.612.210.271,20
7	Penatausahaan piutang reasuransi pada PT Asuransi Asei Indonesia tidak tertib sehingga terjadi kekurangan pembebanan cadangan piutang reasuransi Pada Laporan Keuangan 2016 minimal sebesar Rp18.630.620.944,26
8	Proses evaluasi klaim untuk kredit pegawai plus pada PT Asuransi Asei Indonesia KC Bandung tidak sesuai ketentuan diantaranya terdapat tiga klaim yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar Rp108.177.241,66
9	Penatausahaan dan upaya penagihan piutang reasuransi pada PT Asuransi Asei Indonesia kurang optimal dan memadai
10	Pengelolaan dan penyelesaian piutang subrogasi tidak dilaksanakan secara optimal

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan kesimpulan pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada 4,5,6 dan 7.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Bank Indonesia Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Bank Indonesia dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Bank Indonesia dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

NERACA



- **Aset**
Rp1.955.850.192.000.000,00
- **Kewajiban**
Rp1.955.850.192.000.000,00
- **Ekuitas**
-

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
1 Temuan



20%

Sistem Pengendalian Intern
4 Temuan

80%



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Bank Indonesia Tahun 2016:

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Pengendalian Sistem Aplikasi yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Masih Memiliki Kelemahan-Kelemahan.
2	Aset Dalam Penyelesaian dan Kewajiban Pembayaran Retensi kepada Pihak Ketiga Sulit Ditelusuri Rinciannya.
3	Persediaan Bahan Uang per 31 Desember 2016 Tidak dapat Ditelusuri Kesesuaiannya Dengan Pencatatan Persediaan Bahan Uang/TUB dan Laporan Monitoring Perkembangan Persediaan Bahan Uang.
4	Metode Perhitungan Laba Rugi Selisih Kurs dan Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing (SRTV) Masih Memiliki Kelemahan.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pembayaran Sewa Jaringan Komunikasi Belum Dipotong dan Disetor

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 1 dan 3 serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 1.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LPS dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LPS dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini:
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

NERACA

- **Aset**
Rp72.996.822.428.000,00
- **Kewajiban**
Rp445.178.668.000,00
- **Ekuitas**
Rp72.551.643.760.000,00

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
2 Temuan



40%

Sistem Pengendalian Intern
3 Temuan

60%



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2016 :

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Penerimaan Aset Non Tunai Sebesar Rp13.293.020.525,00 Tidak Sesuai dengan Ketentuan dan Tidak Didukung dengan Pengelolaan yang Memadai
2	Kelemahan Pengaturan Penyelesaian Sisa Aset setelah Proses Likuidasi Berakhir dan Distribusi Sisa Dana Klaim Penjaminan
3	LPS Belum Menyusun Prosedur Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi serta Persetujuan Keberatan Simpanan Nasabah Bank Gagal
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Lembaga Penjamin Simpanan Belum Mengikuti Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pensiun Sistem Jaminan Sosial Nasional
2	Pengadaan Perangkat Komputer Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 1 dan 2. serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 2.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK OJK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK OJK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini:
**Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)**

NERACA

- **Aset**
Rp6.641.537.665.064,00
- **Kewajiban**
Rp2.444.424.691.650,00
- **Ekuitas**
Rp -

Temuan

Kepatuhan Perundang-
undangan
5 Temuan



42%

Sistem Pengendalian Intern
7 Temuan

58%



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2016 :

NO	TEMUAN
Sistem Pengendalian Intern	
1	Penatausahaan Persediaan Belum Tertib
2	Penatausahaan Piutang Belum Tertib
3	Penatausahaan Pendapatan dan Penerimaan Pungutan serta Pendapatan Diterima Dimuka Belum Tertib
4	Pengadaan Sewa Rumah sebagai Pengganti Rumah Dinas Tidak Sesuai dengan PDK Pengadaan Barang dan Jasa OJK
5	Kepemilikan Tanah dan Bangunan Belum Disertifikatkan Atas Nama OJK
6	Penyisihan Kas untuk Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Tidak Jelas Pembentukan dan Peruntukannya
7	Penyajian dan Pengungkapan Beban dalam Laporan Keuangan Tidak Memadai
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	OJK Belum Melaksanakan Ketentuan Pajak Penghasilan Badan
2	Pembentukan Harga Pengadaan Jasa Lainnya pada Departemen Komunikasi dan Internasional (DKIN) Tidak Sesuai Ketentuan
3	Pelaksanaan Tutup Buku Laporan Keuangan OJK Tidak Sesuai Ketentuan
4	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Dana Pensiun dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK Tidak Sesuai Ketentuan
5	Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2016 Dilakukan Tanpa Persetujuan DPR

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pokok-pokok kelemahan yang menjadi dasar bagi BPK memberikan opini pada Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan pada Sistem Pengendalian Intern nomor 1,2,3,4,6 dan 7 serta temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada nomor 2 dan 5.